

## WAJAH KAPITALISME DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

**M. Zahrin Piliang**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Ulum Terpadu Medan  
*email: sidizahrin@gmail.com*

---

### *Abstract*

---

The Indonesian economy was built on the influence of capitalism, starting from the Dutch colonial era, the Old Order, the New Order regime, to the Reformation era. In the midst of this economic development, a surge of nationalism was echoed, through article 33 of the 1945 Constitution. These normative-legal guidelines were confronted with the face of capitalism so that what happened was pseudo-nationalism in the Indonesian economy.

The face of such an economy is marked by the dominance of the Chinese ethnic group, which is only 20 percent but controls economic resources up to 80 percent, while the majority of the people of Boemi Potera, 80 percent, are fighting over the remaining 20 percent of economic resources. As a result, there was a very deep income inequality and gave rise to social conflict between the poets and ethnic Chinese. Meanwhile, the dominance of foreign companies is increasingly unstoppable.

With a growth-oriented economic development policy model, the aspect of equity is relatively lagging behind, so that the poverty rate in Indonesia, at the end of 2019, is above 28 million people. now it is estimated that it has even reached 100 million, because the Indonesian economy has grown by minus 5.32 percent.

**Keywords** : *Capitalism, Indonesian Economy, and Political Economy.*

---

### *Abstrak*

---

Ekonomi Indonesia dibangun di atas pengaruh kapitalisme, mulai dari era jajahan Belanda, masa Orde Lama, rezim Orde Baru, hingga era Reformasi. Di tengah-tengah pembangunan ekonomi itu gelora nasionalisme dikumandangkan, melalui pasal 33 UUD 1945. Panduan normatif-legal itu dihadapkan pada wajah kapitalisme

---

### *Artikel Info*

**Received:**

September 11, 2021

**Revised:**

November 20, 2021

**Accepted:**

December 19, 2021

**Published:**

January 22, 2022

---

sehingga yang terjadi adalah nasionalisme semu dalam perekonomian Indonesia.

Wajah perekonomian seperti itu ditandai oleh dominasi etnik China yang hanya 20 persen tetapi menguasai sumber-sumber daya ekonomi hingga 80 persen, sementara rakyat *boemi poetera* yang demikian mayoritas, 80 persen, justru berebut sumber-sumber ekonomi yang tersisa 20 persen itu. Akibatnya terjadilah ketimpangan pendapatan yang sangat dalam dan memunculkan konflik sosial antara kaum *boemi poetera* berhadapan dengan etnik China. Sementara dominasi perusahaan asing semakin tidak bisa dibendung.

Dengan model kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, aspek pemerataan relatif tertinggal, sehingga angka kemiskinan di Indonesia, di penghujung 2019 bertengger di atas 28 juta orang. kini diperkirakan malah sudah mencapai 100 juta, karena perekonomian Indonesia tumbuh minus 5,32 persen.

**Kata Kunci** : *Kapitalisme, Ekonomi Indonesia, dan Politik Ekonomi.*

---

#### A. Pendahuluan

Merujuk pada pasal-pasal yang mengatur perekonomian dalam Undang-Undang Dasar 1945 terlihat dengan jelas ke arah mana kegiatan ekonomi negeri ini harus berjalan. Pembangunan ekonomi dilaksanakan, tujuannya tidak lain agar rakyat merasakan keadilan dan kesejahteraan sosial tanpa kecuali. Simak Pasal 33 UUD 1945 berikut ini :  
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1);  
”Cabang-cabang produksi yang

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2);  
”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3). Cukup jelas ke mana arah pembangunan ekonomi itu bergerak.

Selanjutnya mari kita baca bunyi pernyataan ini, ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4). Lalu disambung lagi dengan Pasal 34 Ayat 1: ”Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara”; Ayat 2: ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”; dan Ayat 3: ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Pasal-pasal di atas, sangat terang benderang sekali terbaca, bahwa pembangunan ekonomi Indonesia lebih mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial daripada keadilan dan kesejahteraan orang per orang. sebagaimana dalam perekonomian kapitalis. Untuk mempertegas klausul di atas, negara mendudukkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai wakil negara – yang berarti mewakili rakyat –

mengelola kekayaan alam yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, dalam praktiknya, gagasan ideal itu jauh panggang dari api. Setelah kemerdekaan hingga sekarang, nasib mayoritas rakyat ini – yang terdiri dari kaum *boemi poetera* - tak banyak berubah. Secara ekonomi, mereka tetaplah menjadi orang miskin, yang tak banyak berubah sebagaimana zaman kumpeni dulu.

Apa yang dilakukan oleh Soekarno maupun Soeharto, khususnya teknokrat Orde Baru, menurut Didik J. Rachbini, bukan hanya berbeda, melainkan juga bertolak belakang dengan bunyi pasal-pasal ekonomi di atas. Para teknokrat Orde Baru justru mempraktikkan sistem kapitalisme dalam wujud awal, dan kurang humanis<sup>1</sup>. Bahkan keadaan seperti itu di zaman reformasi ini lebih semakin kapitalis. Hal itu ditandai oleh seperangkat Rancangan Undang-Undang yang diajukan pemerintahan

---

<sup>1</sup> Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik, paradigma dan Teori Pilihan Publik*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hal. 8

Joko Widodo, seperti lahirnya Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 2020 yang mengeliminasi fungsi DPR dan BPK dan mengamputasi lembaga yudikatif.<sup>2</sup> termasuk RUU Omni Buslaw (RUU Cipta Kerja – kini menjadi UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini dengan kasat mata lebih mementingkan perusahaan-perusahaan asing dan aseng, daripada kepentingan rakyat.<sup>3</sup>

Mochtar Naim menyebut bahwa perekonomian Indonesia itu melahirkan jurang menganga antara 95 persen penduduk yang merupakan rakyat asli, pribumi—yang sejak awal kelahirannya hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan terbelakang—dan penyertaan sekitar 5 persen dari

ekonomi nasional yang ”bergedumpuk” di sektor nonformal. Sementara hanya sekitar 5 persen lainnya—umumnya nonpribumi—menguasai 95 persen kekayaan ekonomi negeri ini: dari hulu sampai ke muara, di laut, di darat, dan bahkan udara di negara kepulauan terbesar di dunia ini<sup>4</sup>.

Dalam klausul ekonomi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 tersebut, terasa begitu bergelora cita rasa nasionalismenya. Tapi sayang, gelora nasionalisme itu hanyalah semu, belaka, karena secara kasat mata memperlihatkan bahwa yang menikmati kemerdekaan itu bukan warga negara *boemi poetera*, melainkan warga negara Indonesia keturunan. Kita harus jujur dan terbuka mengakui kenyataan ini. Dalam perkembangan terkini, terlihat dengan jelas, dua puluh persen warga keturunan menguasai lebih delapan puluh persen sumber-sumber ekonomi Indonesia, sedang delapan puluh persen warga negara pribumi hanya

---

<sup>2</sup> Lihat *Maklumat Menyelamatkan Indonesia*, dalam *Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia* (KAMI) pada Selasa, 18 Agustus 2020.

<sup>3</sup> *Ibid*, Maklumat, 2020

---

<sup>4</sup> Lihat *Kompas.com*, 22/12/2011

dapat mengakses dua puluh persen sumber-sumber ekonomi. Kekayaan 40 orang Indonesia (Rp. 680 triliun) setara dengan kekayaan sekitar 60 juta jiwa keluarga miskin<sup>5</sup>. Fakta ini menunjukkan, terdapat jurang kesejahteraan yang sangat dalam antara warga keturunan dengan warga *boemi poetera*.

Pernyataan ini tidak boleh dianggap rasis, karena ini fakta. Kita harus bertanya, siapakah yang akan disejahterakan oleh penguasa negeri ini sesungguhnya? Peristiwa kerusuhan sosial antara etnik pribumi dan nonpribumi jangan dilihat dari sekedar belum dewasanya warga pribumi atau umat Islam bertoleransi dalam kehidupan beragama, demikian sebaliknya. Kita harus menyadari bahwa akar persoalan sesungguhnya adalah keadilan dan kesejahteraan ekonomi dan hukum.

#### Problem Etnisitas

Harus jujur mengakui, bahwa persoalan etnisitas di Indonesia belum

tuntas. Klaim bahwa negeri ini Bhinneka Tunggal Ika itu benar sekali. Tetapi harus dilihat konteksnya. Saat menjelang kemerdekaan sentimen nasionalisme berhadapan dengan kolonialisme bisa mengalahkan etnisitas. Sehingga walau kita berbeda suku, adat istiadat, dan bahasa, bahkan agama, namun, demi nusa dan bangsa, kita bersatu dalam pekikan merdeka *ataoe mati*. Tak ada jarak antara elit dengan massa, antara pemimpin dengan rakyat, antara kaya dan miskin, dan antara orang keturunan dan kaum pribumi. Semua menyatu dalam bingkai Indonesia Raya. Itulah yang disebut oleh Ernest Renan sebagai *le desir de'etre ensemble* (kemauan untuk bersatu), itulah suatu keinsyafan rakyat tentang harga diri<sup>6</sup>.

Tetapi, begitu kemerdekaan dicapai, dan sampailah kita dalam menata pengelolaan sumber-sumber ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, “pemberontakan” dengan latar belakang etnis, dan keyakinan mulai

---

<sup>5</sup> Lihat *Tempo*, edisi 22 Februari 2012.

---

<sup>6</sup> Lihat Sukarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Pantia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965, hal. 3-4

muncul. Pemberontakan lokal ini adalah sebuah reaksi atas sikap politik kekuasaan yang mengenyampingkan peran sosio-politik dan kesejahteraan kelompok masyarakat dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan<sup>7</sup> (era berakhirnya negara Sriwijaya dan Majapahit dan munculnya era Islam Nusantara).

Peristiwa pemberontakan itu juga harus dilihat sebagai sebuah bentuk betapa tidak mudah mengimplementasikan kesepakatan politik Pancasila tanpa dibarengi pemenuhan hak-hak dasar (sebagai basis menuju keadilan dan kesejahteraan) setiap kelompok suku bangsa secara proporsional. Politik keadilan dan kesejahteraan yang proporsional akan menghilangkan kesan penguasa mempraktikkan politik peminggiran kaum pribumi.

Sekalipun rezim berganti, tetapi persoalan etnisitas antara *boemi poetera* dan kaum keturunan tak pernah dituntaskan. Apalagi selama

rezim Orde Baru, politik ekonomi Ali Baba telah turut memurukkan posisi ekonomi kaum *boemi poetera* hingga muncul masa Reformasi ini. Di tengah kesenjangan ekonomi yang demikian dalam, rezim Joko Widodo justru mendatangkan “saudara” kaum keturunan langsung dari negeri asalnya 10 juta pekerja China, dengan alasan Indonesia membutuhkan keterampilan TKA<sup>8</sup>, ditambah lagi fenomena Ahok yang angkuh dan kasar saat menggenggam kekuasaan di ibukota Jakarta telah menimbulkan sentimen terhadap kaum keturunan bagai api dalam sekam yang siap membara setiap saat.

Salah satu pemicu terjadinya konflik sosial ini, disebut-sebut adalah kebijakan pemerintah Orde Baru yang memaksakan kaum peranakan China ini melakukan asimilasi (pembauran) dan kemudian mengidentifikasi mereka sebagai bukan pribumi. Pandangan ini dikemukakan oleh Amy Freedman dalam *Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in*

---

<sup>7</sup> Lihat Hasril Chaniago, dalam *Indonesia Lawyer Club* (ILC) TV One, Selasa, 8 Agustus 2020

---

<sup>8</sup> Lihat *Detik Finance*, 9 Juli 2020

*Indonesia* (2003). Sementara itu, sebagian kecil dari etnik china ini menikmati berbagai fasilitas investasi yang diberikan oleh Soeharto, sehingga mereka menjadi sangat kaya raya. Sekelompok kecil ini, akhirnya dianggap sebagai representasi seluruh etnik China. Mereka dianggap memiliki kekuasaan dan mendapatkan kekayaan dengan cara curas.

Sesungguhnya, kebencian pada kelompok etnik China ini bisa dilacak hingga empat ratus tahun ke belakang. Sebelum kedatangan kumpeni Belanda ke Indonesia, etnik China ini sudah ada di Indonesia. Relasi antara masyarakat etnik China ini dengan kaum *boemi poetera* relatif setara sebagai rekan sesama pedagang dan mitra bisnis. Situasi menjadi lain, ketika VOC masuk. VC kemudian memanfaatkan masyarakat etnik China sebagai rekan bisnis dan mendapatkan perlakuan istimewa. Di bidang hukum misalnya, Belanda menempatkan etnik China ini sebagai Timur Asing, menjadi warga negara kelas dua,

sedang kaum *boemi poetera* diposisikan sebagai warga kelas tiga<sup>9</sup>.

Demikianlah, konflik sosial dengan etnik China ini terus berlanjut hingga di zaman reformasi ini, sekalipun beragam kebijakan yang menyetarakan telah dilakukan. Karena akar permasalahan memang pada persoalan ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan dan ketidakesejahteraan sebagian besar kaum pribumi, sehingga persoalan etnisitas itu hingga kini tak terselesaikan dengan baik. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, jumlah kaum miskin makin bertambah, hingga mencapai 100 juta. Potensi sentimen ini tidak boleh dibiarkan berlanjut sebab akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan Republik yang sekarang sedang dikepung oleh kapitalisme global.

#### Kemiskinan Berlanjut

Memang, kemiskinan tidak selalu dilihat dari aspek ekonomi,

---

<sup>9</sup> C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1983, hal. 88-91

sebab kalau hanya aspek ekonomi (*the monetary approach*), kemiskinan lalu disederhanakan menjadi persoalan kekurangan pendapatan (per kapita) atau jumlah kalori yang dikonsumsi oleh individu. Seperti dikatakan Amartya Sen, persoalan kemiskinan lebih dari sekedar persoalan ekonomi. Kemiskinan juga menyangkut persoalan keterbatasan individu terlibat dalam pembangunan negeri, baik akibat ketidakcukupan keterampilan/pendidikan maupun karena pengucilan sosial (*social exclusion*). Akibatnya, individu tersebut tidak mampu memperoleh kesejahteraan<sup>10</sup>. Kemiskinan dalam perspektif Amartya Sen, adalah pencabutan atau kehilangan (*deprivation*) kemampuan atau kegagalan individu untuk mencapai kemampuan dasar atau mendapatkan level kecukupan hidup minimal (*basic capabilities*)<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia*, Malang : BPFE-UNIBRAW, 2007., hal. 117

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 118

Secara konseptual, Yustika menjelaskan bahwa terkait kemiskinan ini, ada kemiskinan struktural, kultural, dan sumber daya. Diuraikan oleh Yustika, pemikiran dalam pandangan struktural lebih dekat pada perspektif pengucilan sosial (*social exclusion*), yaitu kebijakan pemerintah yang tidak memihak kelompok miskin. Sementara itu pendekatan kemiskinan sumber daya lebih dekat dengan perspektif *the monetary approach*, namun tentu saja dalam pengertian yang lebih luas. Lebih lanjut Yustika mengemukakan, dalam pandangan ini kemiskinan terjadi disebabkan ketidaktersediaan sumber daya ekonomi (dan alam). Sedangkan kemiskinan kultural disebabkan adanya sikap/mental sebagian kaum miskin yang tidak berkehendak mengubah nasibnya, yang antara lain ditunjukkan oleh sikap malas<sup>12</sup>.

Beberapa pemikiran dalam melihat kemiskinan itu, pada akhirnya mengerucut pada dua kemiskinan, yaitu kemiskinan relatif dan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 120

kemiskinan absolut<sup>13</sup>. Kemiskinan absolut adalah kondisi pendapatan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Pandangan ini didasarkan pada pendekatan moneter. Sementara itu kemiskinan relatif merupakan kondisi di mana sebagian kelompok masyarakat memperoleh tingkat kesejahteraan (pendapatan) di bawah kelompok masyarakat yang lain. Atas dasar ini, para ahli ekonomi kemudian menyebut kemiskinan relatif lebih dekat pada istilah ketimpangan pendapatan. Dalam hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan ini, program-program yang diambil pemerintah umumnya dikonsentrasikan untuk mengatasi atau mengurangi kelompok masyarakat yang tergolong ke dalam kemiskinan absolut ini<sup>14</sup>.

Dalam konteks ekonomi Indonesia, harus diakui, penyebab

---

<sup>13</sup> Pembahasan tentang ukuran kemiskinan (absolut dan relatif) dapat dilihat pada Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid 1, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2000, hal. 59

<sup>14</sup> Yustika, *Perekonomian...* hal. 120

utama kemiskinan adalah malpraktik pembangunan akibat formulasi kebijakan ekonomi, sosial, dan politik yang salah kaprah. Dari sudut analisis ekonomi politik, terlihat dengan jelas bahwa kebijakan ekonomi yang diproduksi setiap rezim lebih mendahulukan kepentingan pemilik modal dan sektor industri/jasa daripada pelaku ekonomi kecil, yang banyak digeluti oleh kaum *boemi poetera*, seperti sektor informal yang sering (dan banyak) digusur demi mengamankan kepentingan bisnis para pemilik modal<sup>15</sup>. Lokasi para pedagang informal itu disulap menjadi pusat perbelanjaan modern, dan pemerintah sama sekali tidak pernah serius memodernkan pasar-pasar tradisional yang dihuni oleh kebanyakan kaum *boemi poetera* itu.

Politik ekonomi seperti itu terus berlanjut dari satu rezim ke rezim berikutnya. Data tahun 2005 menunjukkan jumlah pasar tradisional 13.450 dengan jumlah pedagang

---

<sup>15</sup> A. Musyaddad, *Kapitalisme Indonesia : Langkah-Langkah Tanpa Peta*, dalam Jurnal Ilmu Sosial & Politik, Vol. 1, No. 1, Juli 2003, hal. 53

berkisar 12.625.000; sementara pertumbuhan pasar modern (*mini market, super market* dan *hypermarket*) 31,4 persen, sedang pertumbuhan pasar tradisional minus 8,1 persen. Setiap tahun 400 kios di pasar tradisional Jakarta tutup. Apalagi, para pemilik modal kemudian melakukan penetrasi ke desa-desa melalui mini market; yang paling gencar menyerbu adalah group Indomaret dan Alfamart. Jelas saja, kehadiran mini market ini telah “membunuh” para pedagang tradisional (kecil). Padahal kita tahu, pasar tradisional di Indonesia merupakan wadah utama penjualan produk berskala ekonomi rakyat. Tentu saja dalam 15 tahun terakhir ini telah terjadi perubahan, jumlah pasar tradisional, menurut data BPS 2018, mencapai 14.182 pasar atau 88,52 persen, sedang pasar modern 1.131 unit, termasuk 708 unit pusat perbelanjaan<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, *Profil Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Tokok Modern 2018*, diunduh pada hari Kamis, 10 Juni 2021, jam 21.40

Di atasnya terdapat perusahaan-perusahaan asing (*Multi National Corporation-MNC*) yang menguasai hampir 70 persen pasar swasta negeri ini. Sebagian besar produk yang dikonsumsi masyarakat rata-rata merupakan produksi perusahaan *multi national corporation* ini. Mulai dari kebutuhan pangan hingga sandang seperti shampo dan sabun semuanya produksi perusahaan besar berskala global. Kita akan terkejut jika melihat betapa tingginya jumlah perusahaan multinasional yang merajai pasar Indonesia, diperkirakan lebih dari 60 perusahaan *national corporation* itu beroperasi di Indonesia. Dari industri makanan, otomotif, jasa bahkan keuangan penggeraknya adalah perusahaan-perusahaan global. Sementara perusahaan lokal lebih banyak bermain di industri yang lebih kecil. Memang ada beberapa yang bisa bersaing dengan perusahaan multinasional asal luar negeri namun jumlahnya bisa dihitung jari, sangat sedikit.

Di atas telah disinggung, terdapat 12,6 juta pedagang kecil. Jika para pedagang itu memiliki rata-rata 4 anggota keluarga, maka terdapat sekitar 48-50 juta (hampir 15 persen penduduk Indonesia) yang menggantungkan hidupnya di pasar tradisional. Fakta ini mengindikasikan, tanpa pemihakan pemerintah terhadap perekonomian rakyat kecil dapat dipastikan nasib pasar tradisional akan semakin tersingkir, dan digantikan oleh pasar modern yang pemiliknya sudah jelas bukan orang *boemi poetera*. Lihatlah betapa serbuan belanja online demikian dahsyatnya. Hampir semua kebutuhan konsumen dapat diakses melalui belanja online. Banyak keperluan konsumen yang semestinya dapat dijumpai di kedai-kedai rakyat, kini makin menumpuk karena konsumen kini beralih belanja online. Akibat buruk dari penetrasi belanja online ini, semakin matinya usaha-usaha kecil dan mikro.

Dengan kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat kecil itu, maka jumlah kemiskinan di Indonesia per

September 2015 masih bertengger di angka 28,51 juta (11,13 persen), dan untuk Sumatera Utara, penduduk miskin tersebut berada di posisi 1.455.950 orang, atau sebesar 10,35 persen dari total penduduk Sumatera Utara. Angka ini pasti didasarkan pada *the monetary approach*, yang kemiskinannya di sederhanakan sebagai kekurangan pendapatan (per kapita) atau jumlah kalori yang dikonsumsi. Jika diuangkan, orang miskin itu hanya memiliki pendapatan kurang dari US \$ 2/hari.

Bandingkan dengan laju pendapatan yang diperoleh warga keturunan yang terus meningkat karena kemampuannya dalam mengakses sumber daya ekonomi, sementara kaum *boemi poetera* tersebut menggapai akses sumber daya ekonomi tersebut karena strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth*). Satu persen penduduk terkaya menguasai separuh kekayaan negara, dan empat orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan

gabungan kekayaan 100 juta penduduk miskin<sup>17</sup>.

Kedua hal inilah yang menurut Dumairy (1996)<sup>18</sup> yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, jika merujuk pada pendekatan kemampuan (*the capability approach*) seperti yang disebut Amartya Sen, maka jumlah kemiskinan di Indonesia lebih dari 28 juta. Hal itu misalnya dapat dibuktikan dengan daya beli masyarakat Indonesia (*purchasing power parity*) yang sangat rendah karena menurut Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina, lebih 50 persen PDB Indonesia ditopang oleh konsumsi. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan tersebut. *Pertama* karena ketidaksetaraan anugerah awal (*initial endowment*) di antara pelaku-pelaku ekonomi. *Kedua*, karena strategi pembangunan di Indonesia yang dalam era

pembangunan jangka panjang pertama Orde Baru lebih bertumpu pada aspek pertumbuhan (*growth*) ekonomi<sup>19</sup>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, jumlah orang miskin tidak saja tidak menurun secara signifikan, sebaliknya, semakin bersifat struktural dan cenderung bertambah, dibanding dengan tingkat kekayaan segelintir warga keturunan. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mencatat, ketimpangan distribusi pendapatan semakin melebar, yang tercermin dari Gini Ratio yang terus meningkat, dari 0,33 (2002), ke 0,41 (2011). Ironisnya, penurunan yang dirasakan oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah tersebut, justru terbalik, terjadi kenaikan kue nasional yang dinikmati oleh 20 persen kelompok terkaya, dari 42, 2 persen (2002) menjadi 48,42 persen (2011), dan 48,27 persen (2014). Sementara kelompok 40 persen golongan menengah mengalami penurunan pembagian kue nasional dari 36,9 persen (2002) menjadi 34,7 persen

---

<sup>17</sup> Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, *Maklumat Menyelamatkan Indonesia*, diucapkan pada tanggal 18 Agustus 2020.

<sup>18</sup> Untuk analisis lebih lanjut, lihat Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1996, hal 53-66

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 66

(2011), dan 34,6 persen (2014). Hingga September 2018, BPS mencatat tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia yang diukur dari rasio gini masih terus berlanjut, hingga berada di level 0,384, dan Maret 2019 turun 0,002 menjadi 0,382. Jurang kekayaan yang demikian dalam itulah, di samping masalah etnisitas, yang menjadi bara dalam sekam yang berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial seperti yang terjadi di berbagai sudut negeri ini.

#### Penutup

Melihat usia yang sudah 75 tahun ini, jika tidak ada perubahan politik ekonomi yang memihak kaum *boemi poetera*, maka bukan tidak mungkin akan terjadi bangsa sendiri menjadi imperialis dan kolonialis, tidak hanya Belanda, tidak pula Jepang, Amerika, atau negara manapun juga. Gejala ke arah itu sudah mulai terlihat. Kini, nasionalisme telah mengalami distorsi yang teramat jauh dari makna aslinya.. Sewaktu sekolah dasar kita diajarkan bagaimana menyanyikan lagu

Indonesia Raya, lagu padamu Negeri, mengikuti upacara bendera setiap Senin pagi, dan menghafal nama-nama pahlawan dalam pelajaran kewarganegaraan.

Tiap tahun kita merayakan kemerdekaan dengan nuansa yang sama; lomba-lomba, seperti makan kerupuk, balap karung dan pawai busana daerah. Sebuah euforia nasionalisme yang tampak seperti asli (sebenarnya), padahal sama sekali bukan yang asli karena tidak diimbangi dengan pemenuhan janji-janji kemerdekaan -yang tertulis sebagai tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Bagaimana kita mengaku seorang nasionalis - sebagai sebuah kesatuan bangsa dan tanah air- ketika yang terjadi malah penggusuran suku asli Papua dari tanah leluhur yang telah diwariskan turun temurun oleh aparat negeri sendiri yang disponsori korporasi? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa wajah ekonomi kita berwajah Pancasila, sementara lebih 70 persen perusahaan *Multi National Corporation* (MNC) merajai

perekonomian Indonesia? Di mana letak lembaga koperasi dalam perekonomian Indonesia? Bukankah lebih tepat untuk mengatakan bahwa Kapitalisme adalah wajah asli pereconomian Indonesia?

Patutlah kita bertanya, apakah ada nasionalisme dalam sila “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ketika yang terjadi justru kekayaan 40 orang Indonesia (Rp. 680 triliun) setara dengan kekayaan sekitar 60 juta jiwa keluarga miskin? Kini, nasionalisme tak lagi dipahami mencintai bangsa, tanah air dan orang-orang yang hidup di dalamnya dan berbuat untuk kepentingan negara, tetapi telah menjadi “mencintai Indonesia bila menghasilkan banyak duit.” Nasionalisme telah bermetamorfosis menjadi nasionalisme semu, atau malah kapitalisme? Tak ada lagi derai air mata yang jatuh ketika kekayaan alam Indonesia dikeruk oleh pihak asing.

### **B. Daftar Pustaka**

Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1996

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1983

Jurnal Ilmu Sosial & Politik, Vol. 1, No. 1, Juli 2003

Rachbini, Didik, J. *Ekonomi Politik, paradigma dan Teori Pilihan Publik*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002

Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Pantia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965

Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jilid 1). Jakarta : Erlangga, 2000

Yustika, Ahmad Erani. *Perekonomian Indonesia, Satu Dekade Pasca Krisis Ekonomi*. Malang : BPFE, 2007